

GLOBAL INSIGHTS JOURNAL

Jurnal Mahasiswa Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional - FISIP - UNJANI
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ>



DOI : <https://doi.org/10.36859/gij.v2i2.3293>

Vol. 02 No. 02 Tahun 2025

Article Informations
Corresponding Email:
rikawidya3010@gmail.com

Received: 10/02/2025; Accepted:
21/02/2025; Published: 30/06/2025

KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK TERHADAP PEMASANGAN SISTEM ANTI RUDAL TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENCE (THAAD) KOREA SELATAN 2016-2017

Rika Widya¹⁾, Agus Subagyo²⁾, Anggun Dwi Panorama³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Pemasangan sistem pertahanan anti-rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) oleh Korea Selatan pada tahun 2016-2017 menimbulkan ketegangan dengan Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menentang kehadiran sistem ini karena dianggap mengancam keamanan nasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kepentingan nasional Tiongkok dalam merespons pemasangan THAAD dengan menggunakan konsep kepentingan nasional yang dikembangkan oleh Donald E. Nuechterlein. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber primer dan sekunder, seperti jurnal akademik, laporan resmi, serta dokumen pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional Tiongkok dalam menanggapi THAAD terbagi ke dalam empat dimensi utama, yaitu pertahanan, ekonomi, tata dunia, dan ideologi. Keberadaan THAAD dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keseimbangan keamanan kawasan, sehingga Tiongkok merespons dengan langkah diplomatik, penerapan sanksi ekonomi, serta mempererat kerja sama militer dengan Rusia. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok dipengaruhi oleh dilema keamanan serta ketergantungan ekonomi dengan Korea Selatan. Meski pemasangan THAAD memicu ketegangan diplomatik, hubungan ekonomi antara kedua negara tetap terjalin.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Korea Selatan, THAAD, Tiongkok

Abstract

The deployment of the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) anti-missile defense system by South Korea in 2016–2017 led to tensions with China. The Chinese government opposed the presence of this system, considering it a threat to its national security. This study aims to explore China's national interests in

responding to the deployment of THAAD using the national interest framework developed by Donald E. Nuechterlein. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data collection was conducted through a literature review encompassing primary and secondary sources, such as academic journals, official reports, and government documents. The findings indicate that China's national interests in responding to THAAD are categorized into four main dimensions: defense, economy, world order, and ideology. The presence of THAAD is perceived as a threat to regional stability and security balance, prompting China to respond through diplomatic measures and economic sanctions. Further analysis reveals that China's foreign policy is influenced by security dilemmas and economic interdependence with South Korea. Although the deployment of THAAD has sparked diplomatic tensions, economic relations between the two countries have remained intact.

Keywords: National Interest, South Korea, THAAD, Tiongkok.

PENDAHULUAN

Dilatar belakangi oleh pecahnya perang persaudaraan yang terjadi wilayah Semenanjung Korea dan membagi wilayah menjadi 2 bagian yakni Korea Selatan dan Korea Utara beberapa dekade silam yang melahirkan perbedaan faham dan sekutu pasca perang dunia ke-2 antara satu rumpun dan darah yang sama. Pada perkebangannya, kala itu Amerika Serikat yang dinobatkan sebagai salah satu Negara ‘pemenang’ dalam world war the second yang tengah melakukan Proxy war menempatkan Syngman Rhee di wilayah Selatan Korea sebagai salah satu alat dan jalan agar kekuatan selatan Korea dikendalikan oleh Amerika Serikat tetap bertahan, sementara disisi lain Soviet (saat ini menjadi Russia) menempatan Kim Il Sung di wilayah Utara Korea (Jery Indrawan, 2019).

Pada perkembanganya, gesekan yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan semakin meningkat, selama 2016 tercatat sebanyak 10 kali uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara meskipun tiga diantaranya tercatat gagal namun uji coba rudal terakhir di tahun 2016, rudal Korea Utara menyentuh zona ekonomi eksklusif Jepang yang mana bertepatan dengan kegiatan G-20 yang sedang dilaksanakan di Hangzhou, Tiongkok. Mengacu pada runutan uji coba rudal Korea Utara, Korea Selatan mulai meyakini jika ancaman yang timbul semakin meningkat dan membuat Korea Selatan mulai menyusun strategi untuk meningkatkan kekuatan dan

memperoleh balance of power guna mempertahankan wilayahnya (Adnan Adwitama, 2022) salah satu strategi yang diakukan Korea Selatan dalam upaya meningkatkan kekuatannya tidak lain dengan menguatkan hubungannya dengan Amerika Serikat.

Jika Korea Utara memiliki Russia dan Tiongkok sebagai ‘sahabat’ dekatnya, maka Korea Selatan memiliki Amerika Serikat sebagai ujung tombak keberlangsungan negaranya. Seperti yang sudah dijelaskan pada fase sebelumnya, Korea Selatan memiliki hubungan yang cukup erat dengan Amerika Serikat, bahkan kelahiran dari Korea Selatan tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat. Hubungan keduanya secara resmi terjalin semenjak tahun 1954, tahun dimana Mutual Defence Threaty disepakati oleh keduanya yang mana menyatakan jika salah satu diantara keduanya mendapatkan ancaman ataupun serangan dari pihak ke-3, maka negara pendukung akan turut bertindak guna mempertahankan kedaulatan negara yang tengah mengalami ancaman. Hal tersebut dibuktikan dengan komitmen Washington untuk melong Seoul dalam perang 3 tahunnya yang menewaskan 32.000 tentara Amerika (Simela Victor, 2016). Seiring berjalannya waktu, hubungan antara keduanya tidak hanya berkembang dalam ruang lingkup pertahanan keamanan namun merangkak dalam bidang-bidang penunjang keberlangsungan kehidupan bernegara. Pasca berakhirnya perang Semenanjung Korea yang sebenarnya menjadi perang gencatan tiada akhir, Korea Selatan berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya dan mulai membangun keutuhan negaranya.

Diawal tahun 1960 pertumbuhan ekonomi Korea Selatan melambung jauh dan menempatkannya pada posisi negara industrialisasi terbesar dunia dan dalam perjalanan Amerika Serikat juga menjadi rekan trading utama Korea Selatan (Liblary of Congress, 2010). Dalam capaian tersebut, Korea Selatan juga merupakan salah satu ‘alat’ yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk melaksanakan intervensi politik dunia ke-3 atau wilayah dunia bagian Asia. Hal tersebut didukung dengan status quo Amerika Serikat sebagai negara adidaya atas kemenangannya dalam perang dunia II dan ditujukan untuk membatasi pengaruh ideologi pesaingnya yakni Uni Soviet

serta ditujukam untuk menyebar luaskan ideologi demokrasi liberal (Murtamadji, 2019). Mengacu pada mutual defence treaty yang disepakati antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman pertahanan Korea Utara di tahun 2017 hingga tahun 2021, keduanya memutuskan untuk menempatkan sistem pertahanan anti rudal buatan Amerika Serikat yang dinamakan Terminal High Altitude Area Defence atau biasa disebut dengan THAAD.

Keputusan pemasangan sistem pertahanan tersebut didasari karena adanya security dilemma yang dirasakan Korea Selatan dan dicanangkan untuk menghalau perilaku Korea Utara yang kian lama kian agressif. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat aktor internasional yang tidak menyetujui atau menentang pemasangan sistem anti rudal yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut. Bukan hanya Sebagian dari masyarakat Korea Selatan yang menentang, namun terdapat Tiongkok sebagai salah satu ‘tetangga’ Korea Selatan yang mengcam dengan sangat keras pemasangan sistem anti rudal Terminal high altitude area defense di wilayah Seoungju tersebut.

Sistem pertahanan anti rudal yang dinamakan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) merupakan sistem pertahanan milik Amerika Serikat buatan Perusahaan pengembangan senjata dan teknologi yang berinduk di Bethesda, Lockheed Martin yang ditugaskan untuk ‘melumpuhkah’ atau melacak keberadaan rudal jarak dekat hingga menengah dengan menggabungkan sistem tembakan langsung atau hit-to-kill dan radar X-band, AN/TPY-2 untuk menghalau serangan rudal balistik didalam maupun diluar atmosfer (Missile Defense Project, 2021). Dengan keresahan yang dihadapi oleh Tiongkok, Tiongkok melayangkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menolak serta mengcam sistem pertahanan anti rudal buatan Amerika Serikat di Korea Selatan. Adapun kebijakan-kebijakan yang di layangkan oleh Tiongkok dimulai dari penolakann secara diplomatik hingga pelaksanaan boikot serta pemutusan sektor perekonomina yang terjalin anatara Tiongkok dan Korea Selatan. Kebijakan tersebut tidak serta merta dilayangkan oleh Tiongkok, namun dibalik para pembuat kebijakan merencanakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya, kebijakan

tersebut didasari oleh kepentingan nasional yang dimiliki dan yang harus dilindungi oleh Tiongkok.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penyusunan penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan peneliti akan menggambarkan dinamika permasalahan yang terjadi secara mendalam. Metode kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang kerap kali digunakan oleh para penstudi hubungan internasional. Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow mendefinisikan metode kualitatif sebagai penelitian yang disusun dengan Kumpulan data dan informasi rinci mengenai isu atau dinamika yang Tengah terjadi dan akan dipecahkan yang bersifat naratif bukan merupakan penelitian yang disusun dengan angka (Sugiyono, 2013).

Creswell yang mendefinisikan metode kualitatif sebagai suatu proses pengkajian dengan cara memahami sikap dan perilaku suatu aktor. Penyusunan penelitian kualitatif juga mencakup elemen pertanyaan penelitian dengan garis haluan yang masih sementara, pengumpulan data permasalahan yang tengah diteliti, analisis data secara induktif yang dimuat pada pengolahan pendapat serta pandangan terhadap hasil data yang telah peneliti peroleh hingga dilakukannya penyusunan kedalam laporan yang terstruktur namun fleksibel. Creswell juga membagi metode kualitatif menjadi lima, yakni: (1) Phenomenological research; (2) Grounded theory; (3) Ethnography; (4) Case studies; (5) Narrative research.

Selain itu, Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriktif-analisis untuk menjelaskan bagaimana kepentingan nasional Tiongkok dalam menghadapi pemasangan sistem anti rudal buatan Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur. Tipe penelitian deskriktif-analisis juga bertujuan untuk menggambarkan, menelaah dan memaparkan kondisi yang telah berlangsung. Metode ini juga merupakan penelitian observasi yang mengedepankan fungsi vital dalam pembentukan hipotesis atau penafsiran liar terhadap dinamika yang tengah dilteliti (Suwandi, 2008). Dengan menggunakan teknik studi literatur serta kepustakaan kepustakaan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan ilmiah serta asumsi peneliti atas penelitian yang sedang dikerjakan. Pengumpulan data melalui dokumen

publik maupun dokumen khusus seperti buku, dokumen resmi negara dan lainnya (Creswell, 2009).

Peneliti juga menggunakan analisis data model menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan jika pelaksanaan analisis data kualitatif dilaksanakan secara aktif dan berjalan secara terus-menerus hingga mencapai data jenuh. Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi 4 aktivitas, diantaranya: (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data; (3) Penyajian data; (4) Verifikasi data (Sugiyono, 2013). Dengan peneliti sebagai intrumen Tunggal dalam pelaksanaan penelitian.

PEMBAHASAN

Hubungan yang terjalin antara Tiongkok dan Korea Selatan tidak secara tiba-tiba terjalin dengan begitu saja. Hubungan Tiongkok dan Korea Selatan sudah terjalin jauh sebelum keduanya memerdekan diri di zaman modern ini. Jika dilihat lebih jauh, Tiongkok dan Korea Selatan sudah menjalin hubungan sejak Tiongkok berdiri dengan identitasnya sebagai Dinasti Ming sementara Korea Selatan sebagai Dinasti Jeoseon. Kedua pihak tersebut memiliki sejarah dan dinamika panjang serta sangat kompleks yang didalamnya melibatkan interaksi politik, perdagangan, pertukaran budaya hingga ilmu pengetahuan (Korean Culture Center, 2020). Dinamika internal yang terjadi dalam arus kebangkitan serta pembangunan dalam negeri yang tengah Tiongkok dan Korea Selatan gencar laksanakan membuat hubungan antara keduanya semakin merenggang. Hal tersebut didukung dengan hadirnya perbedaan aliansi, faham hingga ideologi yang mengakibatkan pecahnya perang korea yang disiasati sebagai proxy war (Badan Pendidikan dan Pelatihan, 2020). Pada tahun 1953, pasca terjadinya perang Korea atau yang kerap kali disebut sebagai perang tiga tahun, gesekan yang terjadi antara Tiongkok dan Korea Selatan semakin keras, hal tersebut mengacu pada akhir dari perang Korea yang membagi wilayah Korea menjadi dua wilayah berbeda. Selain itu, meningkatnya gesejakan juga dikarenakan Tiongkok memiliki peranan penting dalam perjalanan konflik pecahnya

Semenanjung Korea, yang mana pada pelaksanaan perang tersebut, Tiongkok menjadi sosok dibalik panggung Korea Utara bersamaan dengan Uni Soviet atau yang saat ini menjadi Russia untuk melawan Amerika Serikat yang menjadi ‘pahlawan’ untuk Republik Korea, atau yang saat ini sering disebut sebagai Korea Selatan dikala itu.

Dan dalam perkembanganya, Tiongkok dan Korea Selatan baru menjalin hubungan diplomatik secara resmi pada tahun 90-an dan menjadi Negara Asia terakhir yang membuka hubungan diplomatik Bersama Tiongkok di era modern ini, setelah intensitas gesekan antara keduanya yang tidak kunjung menurun karena mulanya Tiongkok hanya mengakui Korea Utara, sementara Korea Selatan hanya mengakui Republik Tiongkok di Taiwan. Hubungan diplomatik antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Korea (Korea Selatan) dimulai pada tanggal 24 Agustus 1992 yang mana ditandai dengan Korea Selatan yang secara resmi mengakhiri pengakuannya terhadap pemerintahan Republik Tiongkok di Taiwan dan mengakui pemerintahan pusat RRT di Beijing (Afhdal Yusra, 2023). Hal tersebut dilakukan oleh Korea Selatan yang mana menghadapi tekanan perubahan dinamika global serta hadirnya tekanan terhadap peningkatan peluang ekonomi antara Tiongkok dan Korea Selatan (Liu Hong, 1993).

Memasuki era modern, hubungan yang terjalin antara keduanya semakin terjalin erat. Tercatat selama 9 tahun menjalin hubungan diplomatik, sebanyak 1,779jt warga Korea Selatan mengunjungi Tiongkok serta lebih dari 70,000 warga Korea Selatan yang menetap di Tiongkok. Disisi lain tercatat kurang lebih 48,227 penduduk Tiongkok mengunjungi Korea Selatan (International Crisis Group, 2004). Kepentingan yang dimiliki dengan hadirnya hubungan diplomatik ini tidak serta merta hanya dirasakan oleh Korea Selatan yang menjadikan Tiongkok sebagai penunjang perekonomiannya, namun Tiongkok juga memiliki kepentingan lebih guna mencapai stabilitas politik Tiongkok di bagian Timur Lautnya. Namun meningkatnya intensitas yang dilakukan Tiongkok dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan Korea Selatan ditandai dengan perubahan kantor hubungan konsuler Korea Selatan di Shenyang menjadi Konsulat

Jenderal. Tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut menjadi bukti nyata jika Tiongkok melanjutkan hubungan antara keduanya pada radar yang lebih serius bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan ekonomi antara keduanya saja.

Pecahnya kongsi Semenanjung Korea menjadi dua bagian dengan latar belakang yang berbeda menghasilkan dinamika kawasan Asia Timur semakin melebar. Ketegangan terjadi dihadirkan oleh Korea Utara yang pada akhirnya menekan Korea Selatan untuk meningkatkan pertahanannya. Dalam upaya mempertahankan pertahanannya, Korea Selatan menghadirkan sistem anti rudal THAAD buatan Amerika Serikat.

Sistem pertahanan anti rudal, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) merupakan sistem pertahanan milik Amerika Serikat yang terbukti dapat menghalau ancaman rudal balistik jarak pendek hingga menengah. Dibuat oleh salah satu perusahaan pertahanan dan kedirgantaraan Amerika Serikat yang giat mengembangkan serta melaksanakan produksi berbagai jenis pesawat, kendaraan darat, kendaraan tanpa awak, rudal, sistem maritim hingga peluncur satelit (PPID, 2017). Yang pada akhirnya menuai penolakan keras dari Tiongkok. Penolakan-penolakan yang dilakukan oleh pemerintahan Beijing terhadap kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Seoul tidak lain karena Beijing menganggap kegiatan serta kebijakan yang diputuskan oleh Seoul mampu menganggu pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh Beijing. sementara dalam kancah internasional, Beijing beranggapan jika Seoul berpotensi memecahkan keseimbangan keamanan regional dan memicu gesekan antar negara kawasan.

Tiongkok mendeteksi ancaman untuk ketahanan dan keamanan nasionalnya. THAAD merupakan salah satu sistem anti misil terbaik buatan Amerika Serikat. Penempatan anti misil bukan menjadi satu satunya permasalahan mengacu pada kekuatan militer Tiongkok yang lebih besar keberasaannya, namun Radar dari AN/TPY-2 dengan X-band-nya tersebutlah yang menjadi titik awal permasalahan. Memiliki jangkauan deteksi hingga menyentuh 1000-3000km dilengkapi dengan pendeksi

inframerah yang dapat mendeteksi lawan dan sumbernya serta dapat menghancurkan misil target secara langsung melalui kontak fisik. Sistem anti rudal THAAD juga sudah kerap kali dipesan dan ditempatkan di beberapa negara. Sehingga mengacu pada kemampuan radar pendukung THAAD tersebut wajar jika Tiongkok merasakan ancaman nyata ketika THAAD ditempatkan di wilayah Korea Selatan. Selain itu, statement yang diberikan oleh Korea Selatan juga Amerika Serikat jika sistem anti rudal tersebut hanya diperuntukan untuk melindungi ketahanan Korea Selatan terhadap ancaman-ancaman yang diberikan oleh Korea Utara dan bukan diperuntukan sebagai bahan untuk melakukan intimidasi Tiongkok tidaklah cukup kuat (Crish Buckley, 2017).

pada faktanya, radar pendukung THAAD mampu mencium kegiatan Tiongkok bagian timur dan utaranya. wilayah timur dan utara Tiongkok yang meliputi Nanjin dan Shenyang merupakan rumah yang digunakan untuk menyimpan perangkat-perangkat militer yang dimiliki Tiongkok dimulai dari perangkat angkatan darat, udara, hingga laut. Selain menjadi rumah untuk menyimpan barang barang berharganya, Tidak hanya Nanjing dan Shenyang yang menjadi sasaran radar X-Band-nya, gurun Gobi tersebut juga merupakan wilayah yang digunakan untuk melaksanakan pengembangan misil Tiongkok. akademisi dan politisi Tiongkok yakni Li Bin mengungkapkan jika Tiongkok tidak vokal dalam menyuarakan penolakan terhadap penempatan sistem anti rudal buatan Amerika Serikat di Korea Selatan, Tiongkok akan dengan secara mudah memberikan informasi yang potensial bagi Amerika Serikat. Selain itu ahli nuklir Wu Riqian juga merespon bahwasannya jika eskalasi ketegangan yang disebabkan oleh THAAD semakin meningkat, dengan kapasitas militer Tiongkok saat ini, Tiongkok akan mengalami kesulitan. (Chrish Buckley, 2017)

Dalam poin kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok kali ini peneliti memasukan kedalam kategori kepentingan pertahanan (defense interest) hal tersebut dikarenakan berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup negara, keamanan secara fisik, dan perlindungan terhadap ancaman eksternal. Dengan spesifikasi yang dimiliki oleh radar X-band sebagai

pendukung THAAD yang dapat mengintip kegiatan yang dilakukan oleh Tiongkok, hal tersebut sudah menjadi ancaman yang ditimbulkan oleh pihak eksternal. Karena dengan terciptanya kegiatan yang dilakukan oleh Tiongkok, pertahanan keamanan yang dimiliki oleh Tiongkok akan melemah. Sementara mengacu pada tingkatan kepentingan nasional menurut Nuechterlein, kondisi kali ini dapat dikategorikan sebagai kepentingan eksistensial (Existensial interest). Hal tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berkaitan dengan hal fundamental, didasarkan pada perlindungan kedaulatan, wilayah serta keselamatan negara dari ancaman langsung. Pada situasi ini, kemampuan radar X-Band mampu mengancam kedaulatan Tiongkok sebagai negara besar. Maka sebagai implementasi dari kepentingan pertahanan ini, Tiongkok menyuarakannya Three No's yang ditujukan pada Korea Selatan.

Three No's merupakan langkah yang dilakukan oleh Tiongkok untuk melindungi kepentingan pertahanannya. Three No's juga menjadi hasil akhir atas upaya yang dilakukan oleh Tiongkok untuk melindungi kepentingan nasionalnya mengacu pada polemik penempatan sistem pertahanan anti rudal THAAD yang terjadi di kawasan Asia Timur. Pasca berakhirknya kepemimpinan Presiden Park Geun Hye dengan skandal besarnya, Moon Jae In menjadi Presiden terpilih di Korea Selatan dan merupakan secercah harapan untuk rujuknya hubungan Tiongkok dan Korea Selatan yang sempat memanas dan mengancam pertumbuhan Korea Selatan. Hingga pada 6 Juli 2017, Presiden Jinping dan Presiden Moon dipertemukan dalam agenda konferensi tingkat tinggi G-20 yang diselenggarakan di kota Hamburg, Jerman. Pada pertemuan perdana antara pemimpin tertinggi Tiongkok dan Korea Selatan tersebut, kedua belah pihak memahami jika kedua negara tersebut perlu untuk memperbaiki hubungan. Presiden Jinping mendesak Korea Selatan untuk turut mengamankan kepentingan utama Tiongkok juga kepentingan kawasan jika Korea Selatan menginginkan hubungan baik antara keduanya terlaksana (Sugiyanti dan Yuniasih, 2019).

Hal tersebut disebabkan Korea Selatan yang masih memiliki kepentingan atas pemasangan THAAD. Korea Selatan juga telah melakukan pertemuan

dengan Presiden Amerika Serikat, Trump. Untuk membahas THAAD yang diartikan sebagai keutusan bersama dan harus dihormati. Pertemuan tersebut juga menjadi wadah untuk menyamakan tujuan yakni untuk membuat Korea Utara menghentikan kegiatan pengembangan nuklir dan rudalnya (Joshua Beliger, 2017) Namun rupanya, kepentingan Korea Selatan atas Tiongkok lebih utama. Sesuai dengan publikasi laporan “A Nation of the people, A Just Republic of Korea” yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2017, didalamnya berisikan bagaimana rencana lima tahun administrasi negara yang menjelaskan jika dibawah tirani Presiden Moo, Korea Selatan masih mengutamakan ekspansi pion industri budaya Korea Selatan dengan memuat 5 tujuan dengan 20 strategi kebijakan serta 100 tugas pemerintahan. Salah dua dari lima tujuan yang dituang dalam laporan tersebut adalah, menciptakan ekologi budaya adil yang kemudian mendorong persebaran Hallyu atau Korean Wave dan memperluas kesejahteraan pariwisata serta merevitalisasi industri pariwisata (Wang dae, 2017). pada faktanya sektor-sektor yang menjadi prioritas tersebut masih bergantung pada pasar Tiongkok. Dibawah kepemimpinan Presiden Moon, Korea Selatan telah mengubah arah kepentingan nasionalnya dari isu penting pada isu yang lebih penting untuk pertumbuhan nasionalnya secara real time. Kepentingan keamanan Korea Selatan diatasi dengan berlakunya kembali kebijakan Sunshine Policy yang mana mengutamakan dialog dan diplomasi untuk memperbaiki hubungan antar Korea. Maka publikasi laporan tersebut menjadi titik terang bagaimana Korea Selatan membalikkan kepentingannya dan menunjukan bagaimana keseriusannya untuk memperbaiki keretakan antara Korea Selatan dan Tiongkok.

Hingga pada 30 Oktober 2017, Korea Selatan dan Tiongkok kembali bertatap muka dalam rapat pemeriksa keuangan oleh Majelis Nasional yang menjadi harapan baru untuk keduanya. Melalui Kang Kyung Wha selaku Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Korea Selatan menyatakan persetujuannya atas poin-poin Three No's yang didesak Tiongkok. Poin-poin tersebut yakni: (1) Tidak adanya pemasangan THAAD tambahan; (2) Tidak adanya partisipasi yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap jaringan pertahanan misil

Amerika Serikat; (3) Tidak adanya pembentukan aliansi militer trilateral yang dilakukan oleh Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang (Paramitha, 2018). Melalui persetujuan Korea Selatan atas desakan Tiongkok yang dimulai dari pertengahan tahun 2016, Korea Selatan kembali memperoleh kepercayaan dari Tiongkok. Selanjutnya pada 31 Oktober 2017, secara bersamaan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok memberikan pernyataan resmi bahwasannya kedua belah pihak telah sepakat untuk memperbaiki hubungan dan melaksanakan normalisasi secara bertahap antara Korea Selatan dan Tiongkok. Keberadaaan Three No's menjadi jalan Tiongkok untuk memperoleh kepentingannya untuk mempertahankan keamanan nasionalya dan mencegah Amerika Serikat memasuki kawasan Asia Timur, sementara Korea Selatan kembali memperoleh sumber keuanganya kembali meskipun Korea Selatan masih memiliki kepentingan nasional berupa keamanan pertahanannya dari ancaman Korea Utara (Paramitha, 2018).

Yang kedua, Kepentingan ekonomi. Sejalan dengan visi yang turut lahir dari masa pendirian Tiongkok, Presiden Jinping juga menggunakan sektor ekonomi untuk memenuhi keinginannya dalam merekonstruksi hubungan Internasional yang salah satunya adalah untuk menyaangi hegemoni Amerika Serikat. Terdapat beberapa program untuk melaksanakan visi Tiongkok, salah satu kebijakan ekonomi ambisius yang dimiliki oleh Presiden Jinping yakni, One Belt One Road yang saat ini dikenal sebagai program BRI. Para akademisi menyatakan jika BRI merupakan visi gro-ekonomi ambisius yang dimiliki oleh Tiongkok. Karena dalam pelaksanaannya BRI dapat menyentuh sekitar 70 negara dan mengklaim dapat menyentuh lebih dari dua pertiga populasi dunia. BRI merupakan program untuk menghidupkan kembali The Silk Road yang dimiliki oleh Tiongkok kuno, namun tidak hanya untuk menghidupkan kembali jalur tersebut, BRI ditujukan untuk memperluas rute dengan berbagai jalur (Joni Robert, 2019). Melalui visi dan misi tersebut, Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi yang cukup besar khususnya di wilayah Asia. Mengacu pada sabuk ekonomi jalur sutra yang menjadi sasaran, tercatat dalam dokumen white paper yang dirilis oleh China's

Information Office of the State Council, Tiongkok telah menyalurkan 256,3 miliar RMB. Dan dibawah kepemimpinan Jinping pada tahun 2013, Beijing tengah membiayai 13.427 proyek di berbagai negara yang senilai 843 miliar USD (Joni Robert, 2019). Hal tersebut sudah menjadi bukti jika Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi di kawasan. Akan menjadi ambigu jika Tiongkok tidak bergeming atas isu THAAD yang selain mengancam keamanan Tiongkok, isu tersebut juga dapat meningkatkan eskalasi ketegangan di kawasan dan menganggu kepentingan Tiongkok.

Dan dengan besarnya Tiongkok secara ekonomi, Tiongkok pada akhirnya memperoleh ketergantungan ekonomi dari Korea Selatan yang memberikan peluang pada Tiongkok untuk menggunakan tekanan ekonomi sebagai respons terhadap pemasangan THAAD, seperti pembatasan impor produk Korea Selatan, boikot terhadap perusahaan-perusahaan tertentu, dan pengurangan wisatawan Tiongkok yang ditujukan untuk Korea Selatan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bagaimana Tiongkok memanfaatkan kekuatannya dalam hubungan ekonomi untuk memengaruhi kebijakan negara mitra. Kepentingan ekonomi Tiongkok berkaitan dengan hubungan dagang dan investasi antara Tiongkok dan Korea Selatan. Secara ekonomi, Tiongkok merupakan mitra dagang utama Korea Selatan, di sektor teknologi tinggi, elektronik, dan otomotif, negara yang menyumbangkan 25% dari total perdagangan Korea Selatan dan juga melebihi nilai perdagangan dengan Amerika Serikat. Sementara di sektor pariwisata, Wisatawan asal Tiongkok dapat meningkatkan pendapatan ekonomi pariwisata Korea Selatan meningkat. Jumlah pengunjung Tiongkok pada Korea Selatan menembus hingga angka 47% dari total wisatawan mancanegara yang mengunjungi Korea Selatan (Jemma Gibson, 2017). Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Tiongkok sebagai respons terhadap THAAD menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan Korea Selatan. Dalam bahasan ini kepentingan nasional yang dimiliki oleh Tiongkok didorong oleh kategori kepentingan ekonomi (economic interest) menurut Nuechterlein. Nuechterlein mendefinisikan kepentingan ekonomi sebagai “The enhancement of the nationstate’s

economic well-being in relations with other states” yang berdimensi pada upaya suatu negara untuk menjamin pertumbuhan ekonomi domestik yang didukung oleh aktor lain. Dalam penelitian yang peneliti laksanakan, Selain Tiongkok yang memiliki kepentingan ekonomi di Kawasan, Tiongkok dan Korea Selatan juga menciptakan dinamika dimana Tiongkok menggunakan leverage ekonominya untuk memengaruhi keputusan strategis Korea Selatan terkait penempatan sistem pertahanan anti rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Dalam penerapan konsep ini, Ketika suatu negara teganggu oleh negara lain, negara tersebut dapat menggunakan langkah-langkah seperti embargo, boikot, atau sanksi sebagai alat diplomasi. Dan secara tingkatan kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Nuechterlein, bahasan kali ini dapat dikategorikan sebagai kepentingan utama (Major Interest) karena meskipun tidak mengancam secara langsung, keberadaan sistem pertahanan anti rudal THAAD dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat Tiongkok dalam jangka panjang.

Yang Ketiga, Kepentingan tatanan dunia. Peranan Tiongkok sebagai Negara besar di kawasan khusunya negara yang menegahi Korea Utara dengan Korea Selatan secara politik, juga yang secara geografis Tiongkok berdampingan langsung dengan Korea Utara dan Korea Selatan. Tiongkok tetap harus memegang komitmennya terhadap denuklirisasi semenanjung Korea, Presiden Jinping perlu memberikan tekanan yang sesuai untuk Korea Utara, karena jika Beijing memberikan tekanan yang terlalu kuat untuk Pyeongyang, Beijing bisa saja mendorong reaksi agresif Pyeongyang, seperti lahirnya peningkatan uji coba rudal Korea Utara atau estimasi terburuknya situasi tidak terkendali bisa saja terjadi dan dapat menyebabkan polemik terbarukan yakni pecahnya peperangan di semenanjung Korea atau bahkan di kawasan . Namun meskipun Beijing memiliki komitmen untuk menekan denuklirisasi Pyeongyang dan Seoul, Pyeongyang tetap menjadi sekutu tradisional Beijing dan memiliki peranan penting sebagai Buffer State/Buffer Zone untuk membendung pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Timur.

Asia Timur dihiasi oleh tiga kecenderungan yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, meskipun Tiongkok sedang mengalami sejumlah

persoalan ekonomi, namun Tiongkok diprediksi akan terus mengonsolidasikan dirinya menjadi great power. Kebangkitan Tiongkok mempertajam kedudukannya sebagai pemeran penting dan sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur serta mengubah power relations antara negara kawasan. Mengacu pada pola pertama yang menjadi kecenderungan, pergeseran pusat ekonomi-politik dunia akan semakin kuat. Seperti tinjauan yang dilakukan oleh Amerika Serikat jika kawasan Asia Timur akan menjadi kawasan yang sangat dinamis. Dan yang terakhir, Kerjasama ekonomi yang mulanya menjadi meja pertemuan untuk kepentingan nasional negara-negara kawasan, akan bergeser menjadi bagian dari strategic readjustment serta memulai kompetisi pengaruh dari negara-negara besar (Abdul Hanafi, 2016). Kemajuan yang dihadapi oleh kawasan Asia Timur dan dengan tumbuhnya Tiongkok sebagai negara penting secara ekonomi dan militer akan mempertegas posisi diplomatik dan pengaruhnya di kawasan. Hal tersebut akan menggeser kekuatan utama yang pasca world war the second yang tidak lain dimiliki oleh Amerika Serikat.

Selain itu, kehadiran THAAD buatan Amerika Serikat di Korea Selatan juga dapat mendorong reaksi dari negara yang secara geografis berdekatan, menjadi preseden bagi negara kawasan yang pada akhirnya dapat memicu persaingan militer. Sistem anti rudal THAAD dapat memantik Jepang dan Russia untuk turut mengembangkan kesediaan militernya dengan skala yang lebih besar. Situasi yang tidak kondusif tersebut membawa ketidakstabilan yang lebih meluas, serta Tiongkok yang menjadi salah satu negara dengan peranan penting akan mengalami kesulitan untuk mendinginkan situasi yang kian pelik tersebut. Selain itu terdapat Taiwan yang masih berupaya untuk memisahkan diri dengan deklarasi Tiongkok atas kepemilikannya, kehadiran THAAD di kawasan akan mendorong Taiwan untuk turut melaksanakan kerjasama militer dengan Amerika Serikat secara massif, menacu pada PRC Gray Zone Pressure Against Taiwan yang dijelaskan oleh CRS yang hingga saat ini Tiongkok masih terus terlibat dalam operasi non-tempur. Para ahli mengatakan jika kondisi tersebut mampu mengikis keunggulan dan kesiapan militer Taiwan (Caitlin Campbell, 2024).

Dengan adanya ancaman yang diberikan oleh Tiongkok serta ketidakstabilan kawasan yang disebabkan oleh THAAD, Taiwan bisa saja turut menyikapi melalui peningkatan pertahanannya, terlebih hingga saat ini Amerika Serikat masih menjaga komitmennya akan bantuannya terhadap penyediaan kemampuan membela diri serta menjaga kapasitas Taiwan untuk melawan kekuatan yang dapat membahayakan rakyat Taiwan. Amerika Serikat juga berkomitmen untuk menyediakan Taiwan sistem yang Taiwan butuhkan untuk pertahanan militernya (Jim Gargamone, 2023).

Dalam bagian ini, peneliti meyakini jika kepentingan nasional yang dimiliki Tiongkok kali ini dapat dikategorikan kedalam kepentingan tatanan dunia internasional (world order interest) yang dikemukakan oleh Nuechterlein. Nuechterlein menjelaskan dalam bukunya jika “world order Interest: the maintenance of an international political and economic system in which the nation-state may feel secure and in which its citizens and commerce may operate peacefully outside its border” hal tersebut merujuk pada dimensi kepentingan nasional yang berkaitan dengan peran serta posisi suatu negara untuk menciptakan dan menjaga tatanan dunia dalam kondisi stabil di sistem internasional. Dalam studi kasus yang tengah peneliti laksanakan, Tiongkok yang mengembangkan peranan penting di kawasannya berusaha untuk menjaga stabilitas kawasan dari eskalasi konflik yang dapat merugikan seluruh aktor kawasan. Sementara disisi lain, Tiongkok yang berhasil mempengaruhi Korea Selatan melalui kebijakan-kebijakannya memperkuat pernyataan Nuechterlein mengenai bagaimana konsep ini menekankan peranan dan posisi suatu negara dalam sistem internasionalnya. Berdasarkan tingkatan kepentingan menurut Nuechterlein, Peneliti menggolongkan kepentingan ini kedalam tingkatan utama (Major Issue) yang dalam bukunya Nuechterlein berpendapat untuk menyelesaikan permasalahan dalam kategori utama, suatu negara biasanya melaksanakan negosiasi diplomatik. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Tiongkok pada persoalan THAAD di Korea Selatan, guna memenuhi kepentingan ini Tiongkok melaksanakan negosiasi-negosiasi diplomatik pada Korea Selatan.

Yang keempat, kepentingan ideologi. Meskipun kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok dalam persoalan penempatan sistem pertahanan anti rudal THAAD di Korea Selatan didominasi oleh kepentingan pertahanan, ekonomi dan tuntutan dunia, namun Tiongkok juga memiliki kepentingan agar sistem demokrasi khas Barat tidak merebak luas di kawasannya. Selain itu, perseteruan ideologi yang bias ini juga merupakan warisan yang diberikan oleh perang dingin pada masa lampau yang melahirkan kompetisi antara Korea Utara dan Korea Selatan hingga saat ini. Disisi lain, Tiongkok sebagai penganut faham komunis yang secara pesat tumbuh sebagai negara dengan kekuatan ekonomi besarnya membuat dinamika kawasan semakin tidak menentu dan memicu intervensi negara adidaya untuk turut andil dalam polarisasi kawasan yang kompleks (M Najeri, 2018). Sikap suatu negara dalam sistem internasional dipengaruhi oleh politik domestik yang pada dasarnya diperuntukan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup negara (*Survival of the state*). Dalam penelitian ini, partai komunis Tiongkok yang memiliki peranan penting untuk memastikan arah serta tujuan Tiongkok untuk menjadi negara maju sesuai dengan visi Tiongkok yang sudah tertanam saat kelahiran Tiongkok sebagai suatu negara. Hal tersebut memaksa Amerika Serikat sebagai juru kunci perang dunia ke-2 serta sebagai pemegang tahta negara adidaya untuk turut berkecimpung di kawasan.

Amerika yang terus berupaya untuk menggenggam dunia dalam tangannya, namun kemunculan Tiongkok sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi dan militer yang cukup besar di Asia bertentangan dengan ambisi Amerika Serikat yang berupaya untuk menjadi kekuatan utama dunia. Tiongkok yang gencar meningkatkan kekuatan pertahanannya memaksa Amerika Serikat untuk menjadikan Asia sebagai salah satu prioritasnya dalam kebijakan luar negerinya. Hal tersebut disebabkan oleh kawasan Asia yang merupakan kawasan penting baik secara geopolitik, militer, dan ekonomi. Beberapa kebijakan serta strategi dilakukan oleh Amerika Serikat untuk melebarkan hegemoninya di wilayah Asia seperti melalui bantuan infrastuktur di Asia

Timur untuk menandingi inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) yang gencar dilaksanakan oleh Tiongkok (Kenneth G, 2011).

Mengacu pada empat kategori kepentingan nasional yang di kemukakan oleh Nuechterlein, dominasi Amerika serikat di kawasan Asia Timur melahirkan kepentingan nasional Tiongkok dalam kategori kepentingan ideologi (Ideological Interest) yang mana dijelaskan sebagai “The protection and furtherance of a set of values that the citizens of a nation-state share and believe to be universally good” kutipan tersebut peneliti jabarkan sebagai perlindungan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu negara. Tiongkok sebagai negara yang memiliki peranan penting di kawasan berusaha untuk membendung pengaruh dunia barat serta meyakini nilai-nilai multipolaritas. Dibuktikan dengan Presiden Jinping pada pertemuannya dengan Presiden Geun-Hye yang menyatakan jika Tiongkok berkomitmen pada denuklirisasi Korea. Tiongkok juga berpegang teguh jika konflik Semenanjung Korea dapat diselesaikan melalui dialog dan konsultasi. Hal tersebut membuktikan bahwasannya dinamika yang terjadi di kawasan dapat diselesaikan tanpa campur tangan Barat.

Sementara secara tingkatan kepentingan nasional, mengacu pada penuturan Nuechterlein, bahasan ini dapat diklasifikasikan sebagai kepentingan utama (major Interest) hal tersebut disebabkan oleh, sikap-sikap yang diberikan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi kesejahteraan negara jika dilihat dari kurun waktu jangka panjang. Meskipun tidak mengancam keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara secara langsung, namun jika Tiongkok tidak menanggapi isu tersebut, peluang Amerika Serikat untuk melebarkan hegemoninya di kawasan Asia Timur akan semakin besar dan ruang gerak Tiongkok di kawasannya akan semakin sulit. Tiongkok tidak secara agresif mengekspor ideologinya seperti Uni Soviet pada masa lampau, namun Tiongkok tetap berusaha untuk mempertahankan legitimasi akan sistemnya dan mengurangi pengaruh nilai-nilai Barat di kawasannya.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Nuechterlein untuk menganalisis faktor pendorong pembuatan kebijakan luar negeri oleh Tiongkok. Nuechterlein menjelaskan jika kepentingan nasional bukan hanya teori atau konsep abstrak, karena kepentingan nasional memainkan peranan penting dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Nuechterlein membagi kepentingan nasional dasar menjadi 4 golongan. 4 golongan tersebut yang kemudian peneliti jadikan sebagai acuan untuk melakukan analisa mendalam. Yang pertama, Kepentingan keamanan. Kepentingan keamanan yang dimiliki Tiongkok atas penempatan THAAD didasarkan atas keputusan Korea Selatan menempatkan THAAD di wilayahnya. Kepentingan keamanan yang dihadapi oleh Tiongkok juga tergolong pada tingkatan survival. Hal tersebut disebabkan oleh radar X-Band AN/TPY Yang kedua, Kepentingan Ekonomi. Tiongkok dengan visi yang dimiliki untuk menjadi negara besar penempatan THAAD mampu mengingkatkan eskalasi militer di kawasan. Jika eskalasi militer meningkat, pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok secara masif akan terpengaruh. Rangkaian jalur perekonomian yang dikembangkan melalui program BRI akan terganggu, juga fakta jika Tiongkok perlu mengamankan uangnya yang tersebar di seluruh dunia. Yang ketiga yakni kepentingan tatanan dunia, Mengacu pada dimensi peranan penting yang dimiliki oleh Tiongkok di kawasan maupun global. Tiongkok perlu memenuhi kepentingan tersebut guna menjaga stabilitas regional, Tiongkok perlu untuk melindungi keteraturan serta menghindari perpecahan kekuatan militer di sistem internasionalnya. Yang terakhir, kepentingan ideologi. Hadirnya rivalitas ideologi yang dimiliki oleh Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan Asia, Tiongkok berusaha untuk membendung hegemoni Amerika Serikat yang mulai memasuki kawasannya.

Yang pada akhirnya kepentingan nasional yang dimiliki oleh Tiongkok akan penempatan THAAD di Korea Selatan yang harus dilindungi oleh Tiongkok tersebut menjadi dasar dan acuan bagi para pengampu kebijakan untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang spesifik . Kebijakan luar negeri yang

dilahirkan dari kepentingan dasar menurut Nuechterlein tersebut juga mampu mengubah arah kepentingan nasional yang dimiliki oleh Korea Selatan. Korea Selatan yang mulanya memiliki kepentingan untuk mengamankan wilayahnya dari ancaman Korea Utara bergeser menjadi kepentingan untuk mengamankan sektor perekonomiannya karena melalui desakan yang dilakukan oleh Tiongkok, Korea Selatan memperoleh kerugian perekonomian yang dalam jangka panjang akan menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakatnya mengacu pada Tiongkok yang merupakan mitra ekonomi utama yang dimiliki oleh Korea Selatan.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk pelaksanaan penelitian dengan tema penempatan THAAD di Korea Selatan selanjutnya yakni tidak lain melaksanakan penelitian dengan menggunakan konsep interdependensi untuk melihat bagaimana dan sejauh apa ketergantungan yang dimiliki Korea Selatan atau negara-negara lainnya terhadap keberadaan Tiongkok sebagai aktor.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafil Fuddin. "Pengaruh Perkembangan Geopolitik dan Geostrategi Tiongkok" Jurnal Kajian Lemhannas Republik Indonesia. Ed 25 (2016).

Caitlin Campbell. 2024."Taiwan: Defense and Millitary Issues" Congressional Research Service.

Chris Buckley, "Why U.S. Antimissile System in South Korea Worries China" <https://www.nytimes.com/2017/03/11/world/asia/us-south-korea-thaad-antimissile-system-china.html>.

Chris Devonshire. 2015. "The China-South Korea FTA: Background and Details" China briefing. <https://www.china-briefing.com/news/china-and-south-korea-sign-free-trade-agreement/> (diakses 28 Januari 2025)

Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. London: SAGE Publications, 2009.

Jim Gargamone. 2023. “U.S. Strengthening Deterrence in Taiwan Strait” DOD News. <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/article/3531094/us-strengthening-deterrence-in-taiwan-strait/>.

Johni Robert Verianto, “Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (Re)kontruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia” Jurnal Hubungan Internasional. Vol.8 No.1 (2019).

Joshua Beliger. “North Korea casts shadow as Trump and Moon meet for first time” CNN World. (29 Juni 2017) Internet, 17 Oktober 2024. <https://edition.cnn.com/2017/06/28/asia/south-korea-moon-jae-in-donald-trump-meeting/index.html>.

Korean Culture Center. “Tentang Korea” Ministry of Culture, Sport and Tourism (2020) Internet 12 Juli 2024. <https://id.korean-culture.org/id/171/korea/65>

M, Najeri. “Kompleksitas Keamanan Kawasan dan Tantangan kerja Sama Keamanan Asia Timur” Nation State: Jurnal of International Studies. Vol.1 No.1 (2018)

Paramitha., Parameswari., dan Widya, A. B. “Upaya Diplomasi Korea Selatan Memperbaiki Hubungan Ekonomi Dengan Tiongkok Pasca Permasalahan Teminal High Altitude Area Defense (THAAD)” Universitas Udayana (2018).

PPID “Perusahaan AS Lockheed Martin Dukung Indonesia Dalam Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX” Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (7 Desember 2017) Internet, 15 Juli 2024. <https://www.kemhan.go.id/2017/12/07/11618.html#:~:text=Lockheed%20Martin%20adalah%20salah%20satu,satelit%2C%20sistem%20dan%20teknologi%20IT.>

Sugiyanti, T., S dan Yuniasih. "Confidence Building Measure (CBM) Korea Selatan Terhadap Tiongkok-Strategi Normalisasi Hubungan Diplomatik Pasca Boikot Ekonomi Tahun 2016" Balcony. (20 September 2019).

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Wang dae, Cheong. "100 Policy Tasks: Five-year Plan of the Moon Jae-in Administration" (Seoul: KCIS, 2017).